

KONFLIK KEKERASAN BERNUANSIA IDENTITAS AGAMA

(Studi Kasus Penolakan Izin Pendirian Gereja Santo Yosep Randudongkal – Pemalang)

TESIS



Disusun Oleh :

TARCISIUS MARDI USMANTO SS

NIM : 54160007

PROGRAM STUDI KONFLIK DAN PERDAMAIAN (MAPS)

UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

YOGYAKARTA

2019

KONFLIK KEKERASAN BERNUANSIA IDENTITAS AGAMA

Studi Kasus Penolakan Izin Pendirian Gereja Santo Yosep Randudongkal – Pemalang

Oleh :

Tarcisius Mardi Usmanto, S.S

NIM 54160007

Telah dipertahankan di depan Dewan Ujian Senat Fakultas Teologi UKDW
pada tanggal 25 bulan Maret tahun 2019 dan dinyatakan

LULUS

Pembimbing I

Pembimbing II

Pdt. Wahyu Satria Wibowo, M.Hum. Ph.D

Pdt. DR. Murtini

Dewan Penguji:

1. Dra. Jeanny Dhewayani, Ph.D
2. Pdt. Wahyu Satria Wibowo, M.Hum, Ph.D
3. Pdt. DR. Murtini

UTA WACANA

Ketua Program Studi Kajian Konflik dan Perdamaian (MAPS)
Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta



Pdt. Handi Hadiwitanto, Ph.D.

ABSTRAKSI

Tesis ini mengangkat kasus penolakan izin membangun gereja sebagai tindak kekerasan berbasis identitas agama. Bangunan gereja dipahami sebagai simbol penguasaan suatu wilayah sehingga menjadi ancaman bagi kelompok lain. Galtung menyorotinya dengan teori kekerasan struktural dan kultural sementara Paul Ricoeur lebih melihat konstruksi pikiran dan simbol-simbol yang dimiliki manusia beragama membuat sekat perbedaan antara yang baik-buruk, selamat-binas, beriman-kafir, benar-sesat, masuk surga-masuk neraka, anak Tuhan-pengikut iblis. Hal ini dalam praktik pergaulan antar manusia sangat memungkinkan gesekan, ketersinggungan dan perselisihan. Maka interpretasi teks dalam hermeneutika penting agar tidak terjadi kesalahpahaman dan konflik yang semakin meluas.

Usulan strategis yang ditawarkan dalam tesis ini amat menarik karena disesuaikan dengan konteks masyarakat Indonesia sebagai orang “timur” yang memiliki budaya *kumpul* sebagai perjumpaan yang diwarnai persaudaraan dan silaturahmi. Pendekatan budaya dipilih oleh penulis untuk membawa masyarakat yang berkonflik mengalami proses dekonstruksi, rekonstruksi dan rekonsiliasi. Perjumpaan menjadi sarana untuk mengubah paradigma menuju masyarakat inklusif. Tanpa semangat untuk menghargai perbedaan, tanpa mata yang berbinar untuk menerima perbedaan sebagai peluang untuk mengembangkan diri, mengenal diri dan menumbuhkan diri dalam perjumpaan dengan orang lain, perdamaian dunia itu tidak dapat diwujudkan. Masing-masing anggota masyarakat harus meletakkan perbedaan di tempat yang positif. Perbedaan itu tidak salah. Perbedaan itu rahmat. Maka kita perlu meyakini semangat untuk toleran dan membebaskan masyarakat untuk mengungkapkan dirinya sejauh tidak menghalangi orang lain untuk mewujudkan kesejahteraan hidupnya.

Dengan paparan tesis ini diharapkan konflik-konflik bernuansa SARA di wilayah lain yang mempunyai demografi hampir mirip dengan Randudongkal kiranya dapat diselesaikan dengan pendekatan budaya. Pendekatan ini lebih dirasa humanis dan menyentuh kehidupan masyarakat serta melibatkannya dalam suatu komunitas yang transformatif.

PERNYATAAN INTEGRITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam tesis ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 25 Maret 2019

Yang menyatakan,



Tarcisius Mardi Usmanto, S.S

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah yang Maharahim yang menganugerahkan kesempatan untuk belajar, meneliti dan menulis tesis ini. Setelah lima belas tahun bergumul dalam karya pastoral sebagai imam diosesan di paroki-paroki, tepatlah waktunya untuk melihat kembali pengalaman dan merefleksikannya lebih mendalam melalui studi. Studi perdamaian ini sangat cocok dan membantu penulis untuk menyoroti kasus-kasus di tengah umat yang pernah penulis hadapi, dan salah satunya ialah penolakan pendirian gereja di tengah masyarakat. Ada banyak faktor yang harus dilihat dan disikapi dalam melaksanakan karya pastoral. Dibutuhkan kajian ilmu untuk menangani persoalan konkret di tengah umat sehingga dalam strategi pastoral yang tepat sasaran dan efektif dalam pencapaiannya.

Semoga tesis ini bermanfaat bagi gerak eksternal Gereja Katolik, khususnya di Keuskupan Purwokerto sehingga kehadiran Gereja makin signifikan dan mengakar dalam masyarakat eks karesidenan Kedu, Pekalongan dan kawasan Barlingmascakeb (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen). Penulis berharap agar Gereja tidak terkesan gagap ketika menghadapi kasus seputar hubungan lintas agama. Gereja harus melakukan diakonia eksternal sebagai implikasi pengikut Yesus Kristus yang mewartakan kerajaan Allah. Penulis menyampaikan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah membantu dan mendukung, khususnya kepada:

- 1. Uskup (emeritus) Keuskupan Purwokerto; Mgr. Julianus Sunarka SJ yang telah mendorong penulis untuk menempuh studi S2 sebagai penyegaran setelah 15 tahun imamat.*
- 2. Uskup Keuskupan Purwokerto yang sekarang: Mgr. Christoporus Tri Harsono yang telah mendukung dan memberi semangat untuk menyelesaikan studi perdamaian ini.*
- 3. Pastor Paroki Kristus Raja Baciro sekaligus teman sekelas di MAPS: Rm. Adolfus Suratmo Atmomartaya, Pr yang memperbolehkan penulis tinggal di pastoran bahkan difasilitasi selama masa studi.*

4. *Dekan Fakultas Teologi dan Para dosen MAPS di Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta.*
5. *Para dosen pembimbing tesis: Bp. Pdt. Wahyu Satria Wibowo PhD yang telah membimbing dan mengatur sistematika tesis agar menjadi tulisan yang baik. Juga Ibu Pdt. Dr. Murtini yang dengan teliti, sabar dan profesional membimbing penulis sehingga tesis dapat selesai dengan baik.*
6. *Romo Paroki Santo Lukas Pemalang, umat Katolik Randudongkal dan Pengurus Stasi Santo Yosep Randudongkal yang telah memberi kemudahan bagi penulis untuk melakukan wawancara dan penelitian.*
7. *Semua pihak yang ikut membantu penelitian dan menyelesaikan tesis ini.*

Amat disadari oleh penulis bahwa tesis ini belum menjadi sebuah kata akhir untuk menyelesaikan kasus-kasus kekerasan berbasis identitas agama. Namun setidaknya tulisan ini membantu dalam menyoroti akar kekerasan berbasis identitas agama dan strategi mengupayakan perdamaian lintas agama. Masih dibutuhkan penelitian berdasarkan disiplin ilmu lain untuk melengkapi dan memperkaya upaya transformasi konflik yang makin marak di era reformasi ini.

Yogyakarta, 25 Maret 2019

©UKDWN

*There is no international peace, without interfaith peace,
there is no interfaith peace, without interfaith dialogue.*

(Hans Küng)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAKSI	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN MOTTO	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	xii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1. Latar belakang Masalah	1
2. Landasan Teori	4
2.1. Kekerasan dalam Perspektif Teori Perdamaian Johan Galtung	4
2.2. Perspektif Filosofis Paul Ricoeur dalam Teori Hermeneutika	7
3. Kerangka Konseptual dan Teoritis	9
4. Rumusan Masalah	10
5. Hipotesis	10
6. Metode Penelitian	11
7. Prosedur Pengumpulan Data	12
8. Prosedur Proses Data	13
9. Metode atau Alat Analisis	13

10. Sistematika Penulisan	13
---------------------------------	----

BAB II KASUS PENOLAKAN IZIN PENDIRIAN GEREJA KATOLIK SANTO YOSEP

RANDUDONGKAL.....	16
-------------------	----

1. Pokok-Pokok Penelitian	17
1.1. Legenda Desa yang Damai Tanpa Hambatan	17
1.2. Keadaan Sosial Religius Masyarakat Randudongkal	19
1.3. Aliran-aliran Islam yang ada di Randudongkal	22
1.4. Penerimaan dan Penolakan terhadap gereja di Randudongkal	23
1.4.1. GPdI “Halleluya” Randudongkal	24
1.4.1.1. Diterima karena gereja Tua	24
1.4.1.2. Diterima karena Relasi Baik Gereja dengan masyarakat sekitar	25
1.4.2. Gereja Pantekosta Pusat Surabaya “GPPS Shalom” Randudongkal	26
1.4.2.1. Ditolak karena Gereja kaum perantau	27
1.4.2.2. Relasi Gereja dengan masyarakat sekitar kurang baik	27
1.4.2.3. Konflik yang terjadi	27
1.4.3. Gereja Katolik Santo Yosep Randudongkal	28
1.4.3.1. Terkendala Izin Pendirian gereja	28
1.4.3.2. Relasi Gereja dengan Masyarakat sekitar	29
1.4.3.3. Konflik yang terjadi	30
1.5. Kontroversi antara Pendukung dan Penolak Izin Pendirian gereja	32
1.5.1. Menolak pendirian gereja	32
1.5.2. Mendukung pendirian gereja	35
1.6. Perdamaian menurut Beberapa Responden	37
2. Rangkuman Kasus Randudongkal.....	39

BAB III ANALISIS PRAKTIK KEKERASAN DALAM KASUS PENOLAKAN IZIN

PENDIRIAN GEREJA SANTO YOSEP RANDUDONGKAL BERDASARKAN TEORI

PERDAMAIAN JOHAN GALTUNG	43
--------------------------------	----

1. Pandangan Galtung tentang Konflik	43
2. Analisis Konflik di Randudongkal berdasarkan Teori Kekerasan Johan Galtung	50

2.1. Jenis kekerasan di Randudongkal	59
2.1.1. Kekerasan langsung	59
2.1.2. Kekerasan struktural	60
2.1.3. Kekerasan kultural	60
2.2. Dampak kekerasan: Kesengsaraan, Keterasingan dan Represi	62
2.3. Kontestasi Agama	62
3. Pandangan Galtung tentang Pembangunan Perdamaian	63
4. Kasus Randudongkal dalam Perspektif Teori Perdamaian Johan Galtung	65
5. Kerja Perdamaian di Randudongkal Menurut Johan Galtung	66
6. Rangkuman	69
 BAB IV ANALISIS PRAKTIK HUBUNGAN LINTAS AGAMA DI RANDUDONGKAL DALAM PERSPEKTIF TEORI PAUL RICOEUR	 72
1. Teori Kritis Paul Ricoeur	72
1.1. Pengertian Hermeneutika	73
1.2. Perspektif Filosofis dalam Teori Hermeneutika	73
1.2.1. Teks sebagai Objek Hermeneutika	74
1.2.2. Otonomi Teks.....	79
1.2.3. Interpretasi dan Eksplanasi	81
1.2.4. Refleksi filosofis dan Interpretasi	83
1.3. Hermeneutika yang membebaskan hidup beragama	84
2. Analisis Praktik Hubungan Antar Agama di Randudongkal dalam Pandangan Paul Ricoeur	86
2.1. Pokok-Pokok Analisis	87
2.1.1. Paradigma Islam terhadap Kristen	87
2.1.2. Nuansa “api” dalam terminologi “kafir” dan “murtad”	90
2.1.3. Simbol-simbol agama lain sebagai ancaman	93
2.1.4. Sikap tertutup terhadap agama lain	94
2.1.5. Narasi-narasi yang tidak membangun perdamaian	95
2.1.6. Sindrom minoritas dan fobia kristenisasi	96
3. Kerja Perdamaian di Randudongkal menurut Paul Ricoeur	98

4. Rangkuman	100
 BAB V STRATEGI MEMBANGUN PERDAMAIAN LINTAS AGAMA DI RANDUDONGKAL	
1. Kasus Randudongkal dalam Komparasi Dua Teori	105
2. Rangkuman Kerja Perdamaian di Randudongkal menurut Komparasi Dua Teori	112
3. Membangun Komunitas Antar Agama yang Berwawasan Damai, Partisipatif dan Transformatif	113
3.1. Mengutamakan dialog	114
3.2. Meninggalkan Sikap dan Perilaku Triumfalistik	116
3.3. Membangun Jejaring untuk Perjumpaan yang Transformatif	117
3.3.1. Pelatihan tentang Islam yang damai.....	118
3.3.2. Pesantren Berkomunitas Bisnis	120
3.3.3. Gelar Budaya lintas iman	121
3.3.4. Diakonia Transformatif	121
3.3.5. Gerakan kaum muda Multikultur: Komunitas “Pondok Damai”	127
4. Skema Strategi Perdamaian di Randudongkal	128
5. Kesimpulan	129
 BAB VI PENUTUP	
1. Kesimpulan	130
2. Saran dan Kritik	133
3. Rekomendasi	133

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 2.1.	Persoalan Internal dan Eksternal	39
Tabel 3.1.	Kekerasan kultural	57
Tabel 3.2.	Tipologi kekerasan	57
Tabel 3.3.	Tabel Pemenuhan Kebutuhan dasar	58
Tabel 4.1.	Langkah-langkah interpretasi	82
Tabel 5.1.	Komparasi teori Johan Galtung dan Paul Ricoeur	105
Tabel 5.2.	Program diakonia transformatif	125
Gambar 1.1.	Teori Konseptual dan Teoritis	10
Gambar 2.1.	Aliran-aliran Islam di Randudongkal	23
Gambar 2.2.	Metode analisis 3P	39
Gambar 3.1.	Segitiga ABC Galtung	46
Gambar 3.2.	Skema segitiga ABC Galtung: Pengurus Gereja Santo Yosep	47
Gambar 3.3.	Skema segitiga ABC Galtung: Ormas-ormas Islam – FKUB	48
Gambar 3.4.	Potensial dan Aktual	54
Gambar 3.5.	Segitiga kekerasan	54
Gambar 3.6.	Sikap, Perilaku dan Konteks	55
Gambar 4.1.	Kerja interpretasi	78
Gambar 4.2.	<i>Journey of my self</i>	79
Gambar 4.3.	Skema analisis teks	98
Gambar 5.1.	Skema strategi perdamaian	128

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Permasalahan mengenai keragaman agama telah ada sejak awal sejarah Indonesia sesuai dengan dinamika sosial politik dari satu periode ke periode yang lain. Dalam perkembangan terakhir, gejala ini tidak dapat dilepaskan dari terbukanya ruang kebebasan setelah Reformasi 1998. Setelah periode itu ada sumber-sumber ketegangan dalam hubungan antar agama, yang tidak jarang berubah menjadi kekerasan. Agama sering dipandang sebagai identitas seseorang yang menjadi dasar klaim yang membedakan seseorang/kelompok beragama dari orang/kelompok agama lain. Yang kerap kali terjadi saat ini ialah politik identitas, dimana agama menjadi kekuatan pembeda. Identitas ini kerap kali dimobilisasi untuk perjuangan kelompok sekaligus menjadi peluang atau justru masalah. Agama dipandang sebagai identitas yang penekanannya bukan pada kandungan teologis atau ritual, tetapi fungsi sosial yang dijalankan.¹

Toleransi atau kehidupan harmonis yang dikonstruksi pada masa orde baru, tidak mengakar pada masyarakat dan menjadi semacam kesadaran kultural tetapi lebih dilakukan sebagai keharusan karena ada tekanan dan kontrol alat-alat kekuasaan negara.² Fenomena toleransi lebih menguntungkan penguasa. John Cobb mengajukan paradigma transformatif sebagai landasan bagi terbentuknya solusi baru dialog agama-agama.³ Beberapa karakteristik mendasar bagi terbentuknya transformasi agama ini, antara lain: *Pertama*, tidak ada dominasi dalam relasi agama-agama. *Kedua*, setiap agama memiliki kebenaran dan keselamatan masing-masing, dengan demikian seseorang tidak dapat mengklaim hanya agamanya yang benar. *Ketiga*, menolak relativisme dan mau belajar dari tradisi dan nilai agama yang berbeda tanpa harus membuang identitas sebelumnya. *Keempat*, kejujuran untuk mau belajar dari agama lain tanpa harus membedakan identitas agamanya.

¹ Zainal Abidin Bagir, *Pluralisme Kewargaan*, (Yogyakarta: CRCS-UGM, 2016) h.21.

² Ibnu Mujib, M.A., *Paradigma Transformatif Masyarakat Dialog*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) h.1.

³ John B.Cobb, *Transforming Christianity and the World, A beyond Absolutism and Relativism*. Edited and Introduced by Paul F. Knitter. Published by (New York, USA: Orbis Book, Maryknoll, 1999) h. 5.

Ketegangan dalam hubungan antar agama bukan sekadar ketegangan antar kelompok agama tertentu, namun negara memiliki andil yang cukup besar.⁴ Salah satu andil pemerintah adalah penegakan hukum yang tidak tegas atau terlambat. Selain itu beberapa kebijakan publik juga tidak selalu membantu. Dalam hal rumah ibadah, meskipun ada revisi peraturan (2006) kasus-kasus masih sering muncul. Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang dimandatkan oleh peraturan tersebut dan diharapkan menjadi instrumen penting jaminan beribadah, belum sepenuhnya efektif, bahkan justru membuat masalah baru. Hubungan antar agama tidak dapat dilepaskan dari problem mayoritas dan minoritas. Di kalangan mayoritas timbul perasaan tidak puas karena merasa terdesak posisi dan perannya, sedangkan di kalangan minoritas timbul ketakutan karena terancam eksistensi dan hak-hak asasinya. Problem tersebut membawa implikasi dalam hubungan antarumat beragama dan pergaulan masyarakat dan menggejala dalam berbagai bentuk ketegangan, ditambah lagi kurang eratnya pergaulan antar pemuka agama.⁵

Meskipun ada peraturan pemerintah yang mengatur kerukunan antar agama, masih perlu diupayakan dialog sebagai jalan menuju perdamaian. Adanya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah belum menjamin dalam pelaksanaan di masyarakat berjalan dengan baik. Mengapa masih terjadi penolakan dari sekelompok orang ketika permohonan izin membangun gereja diajukan? Inilah yang menjadi permasalahan utama dalam tesis ini. Bangsa Indonesia menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar Negara dan menjamin kebebasan bagi para pemeluk agama untuk beribadah, namun dalam realitas kemajemukan tidak mudah menerima perbedaan sebagai kekayaan. Perbedaan masih dianggap sebagai ancaman bagi kelompok.

Praktik dialog lintas agama di Randudongkal memang tampak baik dan masyarakatnya rukun. Dialog kehidupan terjalin dengan baik, namun masih diikuti pengecualian keberadaan gedung gereja. Hal ini menunjukkan adanya kekerasan yang bukan bersifat fisik, namun kekerasan struktural bila mengacu pada teori perdamaian Johan Galtung. Kekerasan dapat terjadi dari benturan struktur sosial atau juga kultural.⁶ Jika relasi agama dan negara harus dihadapkan secara struktural, bentuk-bentuk diskriminasi maupun ketidakadilan akan bermunculan. Tatanan yang bersifat strukturalistik tidak mungkin menghasilkan relasi agama dan negara yang jujur dan

⁴ Zainal Abidin Bagir, (2016) h.12

⁵ Djohan Effendi, *Pluralisme dan Kebebasan Beragama*, (Yogyakarta: Interfidei, 2010) h.66.

⁶ Johan Galtung, *Peace, Peacefull Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*, (London: IMPRIO, SAGE Publication, 1996) p. 43.

adil. Yang terjadi adalah diskriminasi oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas.⁷ Salah satunya adalah yang dialami oleh Gereja Santo Yosep Randudongkal, Pemalang dalam kasus penolakan izin pendirian gereja. Dalam kasus tersebut telah terjadi kekerasan bernuansa identitas agama.

Kekerasan bernuansa identitas agama terjadi dalam kasus penolakan izin pendirian gereja Santo Yosep Randudongkal. Proses pengajuan permohonan izin berhenti di kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang. Prasangka praktik suap oleh para pengurus perizinan memancing keributan dan menimbulkan sikap kontra di kalangan ormas Muhammadiyah. Kemenag tidak memberikan persetujuan atas permohonan yang diajukan dan proses tidak berlanjut ke FKUB. Langkah mediasi juga tidak dilakukan oleh pihak pemerintah. Situasi makin memanas ketika ada ancaman dari ormas Muhammadiyah untuk mendatangkan FPI. Ketujuh pemuka agama Islam yang telah ikut menandatangani permohonan IMB dikucilkan Ormas dan tidak boleh memimpin ibadah sebagai imam di masjid agung Randudongkal.⁸ Menurut pimpinan Ormas Muhammadiyah Randudongkal, umat Katolik dipersilakan memakai rumah yang selama ini untuk kegiatan ibadah, namun tidak boleh membangun gereja karena rumah itu letaknya di dalam kota. Selain alasan itu, ada prasangka dan kecemasan kalau perizinan dikabulkan akan dibangun gereja besar dan megah dengan bantuan dana dari Vatikan. Isu kristenisasi pun menjadi ancaman. Dari beberapa kalangan tokoh agama juga ada pembatasan jumlah gereja cukup satu seperti yang telah ada yaitu gereja GPdI (Gereja Pantekosta di Indonesia) “Halleluya”, tanpa memahami adanya denominasi Kristen yang berbeda-beda. Situasi ini menggambarkan masyarakat yang resah, tidak damai, saling berprasangka buruk, terjadi pelanggaran hak beribadah dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas.

Persoalan yang perlu dicermati adalah kesiapan masyarakat Randudongkal untuk berdialog secara humanis dan transformatif, terutama kaum muda yang dilibatkan agar tercipta rekonsiliasi konflik lintas agama dan terjadi pendidikan damai melalui perjumpaan. Perjumpaan akan mengubah prasangka buruk yang kerap kali menyumbat toleransi. Kaum muda adalah *human asset* untuk masyarakat masa kini dan masa depan yang harus dilibatkan sejak sekarang

⁷ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999) h. 57.

⁸ Tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat yang menyatakan bahwa keberadaan rumah ibadah tidak bertentangan dengan kerukunan antarumat beragama dan tidak keberatan atas dibangunnya gereja, tertanda tangan Juni 2011 ialah AZa, H. Bu. A, Mu, Tan, Ust. Al Az, H.M. Dzak, dan Cha.

sebagai upaya pendidikan multikultur. Kebutuhan yang mendesak saat ini ialah terciptanya masyarakat damai, inklusif, egaliter, dan demokratis. Hal ini merupakan pekerjaan yang tidak mudah karena harus keluar dari garis kenyamanan dan membangun dialog humanis transformatif. Umat Katolik Randudongkal menghadapi kegagapan ketika hubungan lintas agama dirasa tidak ada masalah, namun dalam proses pendirian gereja menjumpai kesulitan.

Diharapkan tesis ini mengarahkan pembaca dan masyarakat pada kehidupan yang damai, tidak ada kekerasan, tidak ada diskriminasi, tanpa prasangka dan kebebasan hidup beragama dan berkeyakinan terjamin. Inilah *output* yang akan diperoleh dari pembangunan masyarakat multikultur. Pengetahuan agama harus mendalam dan berwawasan kebangsaan. Izin pendirian rumah ibadat selain masjid dapat disahkan, dapat diterima oleh seluruh masyarakat Randudongkal dan proses perizinan tidak dihambat oleh kelompok ekstrem. Akhir dari semua ini adalah terwujudnya masyarakat Randudongkal yang sadar damai, makin inklusif dan menerima kondisi multikultur. Kesadaran akan pentingnya kehidupan masyarakat yang harmonis sudah dimiliki oleh banyak pihak, namun cara untuk mewujudkan cita-cita bersama itulah yang masih harus ditempuh secara tepat. Kesadaran yang telah dimiliki perlu didukung dengan pilihan strategis yang tepat, kontekstual dan berkelanjutan.

Faktor yang mendukung perdamaian lintas agama di Randudongkal ialah (1) peran para tokoh agama yang menjadi pelopor dialog. (2) peran masyarakat yang menjadi subjek pendukung perdamaian lintas agama (3) kepala kantor Kemenag Pematang Jaya yang sekarang sangat terbuka dan memediasi lintas agama tanpa memandang mayoritas atau minoritas. Bahkan beliau pernah menyampaikan dalam sebuah rapat FKUB bahwa tugas kepala Kemenag ialah melayani semua agama, bukan hanya agama mayoritas. Sedangkan, faktor yang menghambat dan perlu diwaspadai ialah radikalisme agama, fundamentalisme, konservatisme dan paham ekstrem lainnya.

2. Landasan Teori

2.1. Kekerasan dalam Perspektif Teori Perdamaian Johan Galtung

Kekerasan sudah mewarnai hidup manusia dalam interaksinya dengan sesama dan lingkungannya. Kata kekerasan adalah terjemahan dari kata Inggris *violence* yang berkaitan erat dengan gabungan kata latin “vis” (daya, kekuatan) dan “latus” yang berasal dari *ferre*, membawa)

yang kemudian diartikan membawa kekuatan.⁹ Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kekerasan adalah perihai atau sifat keras, paksaan, perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain.¹⁰

Johan Galtung (1930-sekarang) merupakan pelopor dalam kajian konflik dan perdamaian. Galtung mendefinisikan perdamaian sebagai “*the absence of violence*” atau tidak adanya kekerasan baik kekerasan personal maupun kekerasan struktural. Yang pertama disebut perdamaian negatif (*negative peace*), yakni tidak adanya kekerasan personal. Yang kedua disebut perdamaian positif (*positive peace*), yakni tidak adanya kekerasan struktural, terciptanya keadilan sosial, distribusi egaliter kekuasaan dan sumber daya. Kekerasan dipahami bukan hanya tindakan melukai, membunuh (secara sengaja), tetapi sebagai situasi negatif yang dialami sebagian besar umat manusia, yang disebabkan oleh struktur kekuasaan yang tidak adil. Kekerasan terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa, sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya.¹¹ Jadi kekerasan didefinisikan sebagai penyebab perbedaan antara yang potensial dan yang aktual. Galtung mengambil kasus orang meninggal pada abad ke-18 karena penyakit TBC tidak dikategorikan sebagai kekerasan. Bila orang itu meninggal pada masa sekarang, dimana peralatan sudah demikian canggih dan obat-obatan sudah banyak ditemukan, tidak diberi pengobatan, di situ ada unsur kekerasan. Apalagi bila orang itu dibiarkan, ditelantarkan hingga mati.

Kekerasan itu ada, bila yang potensial lebih tinggi dari yang aktual. Kekerasan didefinisikan sebagai penyebab perbedaan antara yang potensial dan yang aktual. Tingkat realisasi potensial ialah apa yang memang mungkin direalisasikan sesuai dengan tingkat wawasan, sumberdaya dan kemajuan yang sudah dicapai pada zamannya. Galtung menggabungkan antara tersedianya fasilitas dan mobilitas dengan kemauan baik untuk mengatasi kekerasan. Penyalahgunaan sumber-sumber daya, wawasan dan hasil kemajuan untuk tujuan lain atau dimonopoli oleh segelintir orang saja, maka ada kekerasan dalam sistem ini. Keadaan itu menyebabkan tingkat aktualisasi massa rakyat berada di bawah potensialnya. Galtung melihat jenis kekerasan ini adalah kekerasan tidak langsung atau kekerasan struktural. Galtung melihat

⁹ I. Marsana Windu, *Kekuasaan dan kekerasan menurut Johan Galtung*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992) h. 62.

¹⁰ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988) h.758.

¹¹ Johan Galtung, “Violence, Peace and Peace Research” dalam *Journal of Peace Research (JPR)*, No. 3 Vol. 6 (1969) h. 167-191.

bahwa setiap krisis relasi sosial terdapat berbagai tingkatan sifat penyelesaian. Setiap tingkat sifat penyelesaian mempunyai risiko dan kendala-kendalanya yang berbeda. Galtung memilahnya menjadi tingkat penyelesaian *yielding* (mengalah), *withdrawal* (menarik diri), *contending* (menyerang) *compromising* (kompromi), dan *problem solving* (pemecahan masalah). Tingkat penyelesaian pemecahan masalah berada pada tingkat tertinggi dimana masing-masing pihak konflik melakukan pertukaran empati dan menciptakan kesepakatan yang merupakan jawaban dari muatan kepentingan dari relasi krisis sosial. Tingkat pemecahan masalah adalah kondisi ideal yang dalam banyak kasus hanya sebagian saja yang bisa mencapainya. Pada konteks inilah Johan Galtung menyebut *transcend approach* yang diterjemahkan sebagai pendekatan 'keluar dari keterbatasan'. Bagi Galtung untuk 'keluar dari keterbatasan' dan mencapai pemecahan masalah, setiap krisis relasi sosial memerlukan pihak lain untuk menekan kekerasan, mendorong subyek kembali pada kesadaran, dan menciptakan peluang pertukaran empati. Pihak tersebut adalah mediator konflik yang diterima sebagai 'netral'. Galtung memercayai bahwa posisi netral adalah proses politik yang melibatkan setiap subyek yang berada dalam konflik.

Dalam artikelnya, "*Twenty-Five Years of Peace Research: Ten Challenges and some Responses*", Galtung mengungkapkan bahwa kekerasan menjadi halangan untuk memenuhi kebutuhan dasar.¹² Kebutuhan dasar itu menyangkut hidup manusia secara utuh. Ada empat kebutuhan dasar yaitu: kelangsungan dan kelestarian hidup, kebebasan, kesejahteraan dan identitas. Pemenuhan kebutuhan dasar ini idealnya berjalan dengan serempak karena menyangkut semua dimensi hidup manusia. Berdasarkan konsep mengenai kekerasan, pemahaman Galtung mengenai perdamaian diperluas. Beberapa butir penting dari pendapat Galtung dapat diringkas sebagai berikut. *Pertama*, Galtung berusaha memahami konsep kekerasan secara luas. Perluasan ini tampak dalam definisi kekerasan yang diberikan Galtung yaitu penyebab perbedaan antara yang potensial dan yang aktual, antara apa yang mungkin ada dan apa yang memang ada. Perluasan ini secara konkret tampak dalam enam dimensi kekerasan: fisik-psikologis, pengaruh positif-negatif, dengan objek-tanpa objek, ada subjek-tanpa subjek, disengaja-tak disengaja, dan tampak-tersembunyi. *Kedua*, Galtung berusaha membahas masalah kekuasaan dan kekerasan di satu pihak dan perkembangan dan perdamaian di lain pihak. Kekerasan adalah lawan dari perdamaian dan anti perkembangan. Kekerasan merintangi perealisasi diri dan pertumbuhan pribadi manusia. Kekerasan juga menghalangi terlaksananya tujuan dari perkembangan yaitu

¹² I. Marsana Windu (1992) h.79.

terwujudnya nilai-nilai untuk mengembangkan strategi masyarakat. *Ketiga*, konsep kekerasan yang luas, demikian juga pemahaman tentang perdamaian. Perdamaian dipahami sebagai tidak adanya kekerasan baik personal maupun struktural. Perdamaian dimaksudkan sebagai usaha-usaha untuk menghapus kekerasan personal (peperangan) dan ketidakadilan sosial (sistem dominasi) sebagai manifestasi kekerasan struktural.

2.2. Perspektif Filosofis Paul Ricoeur dalam Teori Hermeneutika

Mengapa orang begitu keras dengan agama? Agama merupakan hal yang absolut dan tidak mungkin ada tawar-menawar. Ada kesadaran bahwa semuanya itu sudah menjadi konstruksi. Tuhan selalu dikonstruksikan. Maka kerjasama antar agama memang sulit, namun bisa dilakukan. Pengenalan akan Tuhan berkaitan dengan bahasa, simbol dan konstruksi pikiran manusia. Setiap manusia berbeda dan ketika menganggap diri paling benar lalu mengesampingkan yang lain, maka terjadilah konflik. Berkaitan dengan bahasa, simbol dan konstruksi pikiran manusia, Paul Ricoeur menolong untuk melihatnya dalam perspektif filosofis hermeneutik.

Paul Ricoeur (1913-2005) seorang pemikir kritis dari Prancis terkenal dengan teori hermeneutik-nya. Kata *hermeneutic* berasal dari bahasa Yunani *hermeneuin* yang berarti "menafsirkan", dan kata bendanya *hermeneia* yang berarti "penafsiran" atau interpretasi", dan kata *hermeneutes* yang berarti penafsir. Dalam pemikiran hermeneutikanya, Paul Ricoeur lebih mengarahkan hermeneutika ke dalam kegiatan penafsiran dan pemahaman terhadap teks (textual exegesis). Paul Ricoeur sependapat dengan statement Nietzsche bahwa hidup itu sendiri adalah interpretasi, bila terdapat pluralitas makna, maka di situ interpretasi dibutuhkan.¹³ Dalam perspektif Paul Ricoeur, hermeneutika adalah kajian untuk menyingkapkan makna objektif dari teks-teks yang memiliki jarak ruang dan waktu dari pembaca. Melalui bukunya, *De l'interpretation* (1965), Paul Ricoeur mengatakan bahwa hermeneutika merupakan teori mengenai aturan-aturan penafsiran, yaitu penafsiran terhadap teks tertentu, atau tanda, atau simbol yang dianggap sebagai teks. Menurutnya, tugas utama hermeneutika ialah di satu pihak mencari dinamika internal yang mengatur struktural kerja di dalam sebuah teks, di lain pihak

¹³ Abdul Wachid, "Hermeneutika Sebagai Sistem Interpretasi Paul Ricoeur" dalam Memahami Teks-teks Seni, *Jurnal Imaji*, Vol. 4, No.2 STAIN Purwokerto, Agustus 2006, h. 214.

mencari daya yang dimiliki kerja teks itu untuk memroyeksikan diri ke luar dan memungkinkan ‘substansi’ teks itu muncul ke permukaan.¹⁴

Hermeneutika fenomenologis Ricoeur yang erat kaitannya dengan pemahaman teks yaitu tentang (1) Konsep Teks, dan (2) Interpretasi Teks. Tugas utama hermeneutika adalah untuk memahami teks. Dalam pembahasan mengenai teks, Ricoeur membedakan wacana dalam bahasa lisan (sebuah dialog) dan bahasa tulis (sebuah teks) adalah (1) dalam sebuah teks, makna yang terdapat pada “apa yang dikatakan” (what is said) terlepas dari proses pengungkapannya (*the act of saying*), sementara dalam bahasa lisan, kedua proses itu tidak dapat dipisahkan.¹⁵ Sebuah teks ditulis bukan untuk pembaca tertentu, melainkan kepada siapa pun yang dapat membaca, dan tidak terbatas pada ruang dan waktu. Karena teks menurut Ricoeur adalah sebuah karya tulis yang memiliki Otonomi, maka interpretasi adalah merupakan pembacaan yang merespon otonomi tersebut, dengan menggambarkan secara bersama elemen-elemen “pemahaman” dan “penjelasan (eksplanasi)” dan menggabungkannya dalam satu proses interpretasi yang kompleks. Artinya dalam aktivitas memahami teks, Ricoeur mendialektikakan antara *verstehen* (pemahaman/understanding) dan *erklaren* (penjelasan/eksplanasi) dalam suatu proses interpretasi.¹⁶ Interpretasi merupakan pemahaman yang diaplikasikan ke dalam ekspresi kehidupan yang tertulis. Menurut Ricoeur interpretasi adalah “usaha akal budi untuk menguak makna tersembunyi di balik makna yang langsung tampak, atau untuk menyingkapkan tingkat makna yang diandaikan di dalam makna harafiah”

Paul Ricoeur berpendapat bahwa paradigma harus berubah agar menemukan hal baru (*novelty*) yang mendekatkan kita pada realita yang benar melalui perjumpaan. Tampak fenomena dasarnya dari proses lahirnya kreativitas, bahwa pertama-tama di dalam imajinasilah terbentuk “ada yang baru” dan bukan di dalam kehendak. Kepada imajinasilah suatu teks ingin berbicara dengan mengusulkan kemungkinan-kemungkinan baru dan gambaran-gambaran yang membebaskan diri subjek.¹⁷ Kehadiran orang lain itu perlu demi eksistensi diri kita dan menjadikan diri kita yang sebenarnya. Bahasa tidak pernah cukup untuk mewakili kebenaran.

¹⁴ Abdul Wachid, (2006) h. 215.

¹⁵ Paul Ricoeur, *Hermeneutika Ilmu Sosial*, diterjemahkan oleh Muhammad Syukri, cet. Ke-2, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008) h. 180.

¹⁶ Paul Ricoeur, *Teori Interpretasi: Memahami Teks, Penafsiran dan Metodologinya*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2012) h.149.

¹⁷ Haryatmoko, “Transparansi sebagai proses hermeneutika” dlm *Tulus seperti merpati Cerdik seperti ular*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001) h. 69.

Dialog harus menjadi kesadaran baru melalui diskursus. Bagi Paul Ricoeur, identitas selalu berproses dalam tiap perjumpaan sehingga transfigurasi menjadi suatu keharusan bukan sekadar kerelaan. Paradigma diubah melalui perjumpaan hingga mendekati realitas yang sebenarnya. Perdamaian harus ada sebelum dialog, tanpa perdamaian tak mungkin terjadi dialog. Dalam praktiknya dialog dalam percakapan sulit terjadi sehingga menimbulkan prinsip yang penting tidak mengganggu. Kerap kali dialog masih dipakai sebatas strategi; untuk mencari kawan, strategi diterima lingkungan, strategi bisa mendirikan gereja. Dialog mesti bertitik tolak dari saling percaya dan ketulusan. Selama ini hubungan kita hanya bertolak dari simpati saja dengan memberi ucapan selamat di hari raya, melakukan kunjungan dan sebagainya. Gereja selalu mengambil posisi untuk memberi (sembako; misalnya), namun tak pernah menerima.

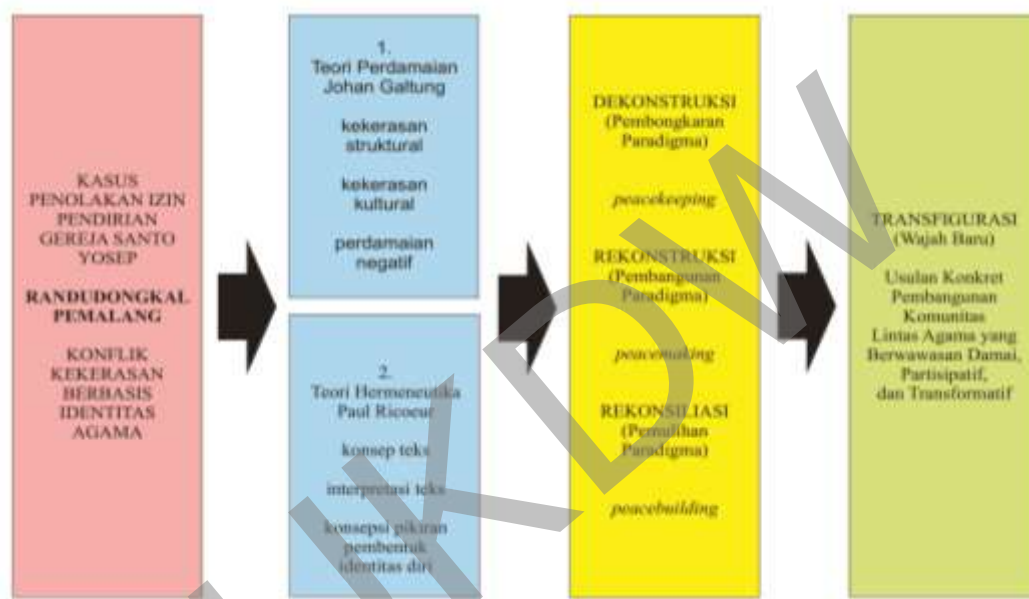
Menurut Paul Ricoeur tidak ada pengetahuan langsung tentang diri sendiri. Pengetahuan tentang diri adalah masalah penafsiran (hermeneutika). Penafsiran membantu menguak makna teks. Prinsip hermeneutika Paul Ricoeur ini dapat mendasari penerimaan pluralisme. Tuhan terlalu kaya, dalam arti tidak dapat dibatasi, sehingga tidak mungkin hanya satu tradisi pengalaman beragama, yang tentu saja terbatas, dapat mengungkap dan menggambarkan secara menyeluruh kepenuhannya. Setiap agama memiliki kekhasan dan nilai-nilai masing-masing. Kekhasan suatu agama tidak identik dengan masalah superioritas. Dengan tetap menghormati identitas agama lain, suatu agama ditantang untuk menjawab pesan yang diterima dari agama-agama lain.¹⁸ Relevansi pengambilan jarak yang mengambil bentuk analogi permainan, dalam hubungan antar agama terletak dalam upaya untuk menciptakan peluang bagi perjumpaan-perjumpaan informal, seperti olah raga, theater, musik dan sebagainya. Aktivitas ini mencairkan suasana dan membuka ruang perjumpaan pribadi. Segregasi sosial atas dasar agama sejak kecil semakin menyuburkan prasangka-prasangka negatif. Hal ini menantang mereka yang memiliki kehendak baik untuk menemukan cara dan memberi kompensasi kepada anak-anak yang sejak kecil hanya mengenal teman-teman seagamanya.

3. Kerangka Konseptual dan Teoritis

Kasus penolakan izin pendirian gereja Santo Yosep Randudongkal merupakan konflik kekerasan yang bernuansa identitas agama (gambar 1.1). Kasus ini akan disoroti dengan dua teori, yakni teori perdamaian Johan Galtung dan teori hermeneutika Paul Ricoeur. Berdasarkan

¹⁸ Haryatmoko, "Hermeneutika Paul Ricoeur" dlm *BASIS*, (Nomor 05-06, Th Ke-49, Mei-Juni 2000) h.27.

kedua teori tersebut ditempuh langkah dekonstruksi, rekonstruksi dan rekonsiliasi sebagai gerak dinamis yang membentuk konsepsi identitas. Dalam usulan Johan Galtung, perdamaian itu dicapai melalui tindakan *peacekeeping*, *peacemaking* dan *peacebuilding*. Strategi ini mengarah ke tujuan perdamaian yakni tranfigurasi (wajah baru) bagi masyarakat Randudongkal dengan usulan konkretnya pembangunan komunitas lintas agama yang berwawasan damai, partisipatif, dan transformatif.



Gambar 1.1 Teori Konseptual dan Teoritis

4. Rumusan Masalah

Penulis melihat masalah yang melatarbelakangi tesis, yaitu:

- ✓ Apa yang menyebabkan terjadinya penolakan izin pendirian gereja di Randudongkal?
- ✓ Apa yang mesti dilakukan agar tercipta masyarakat majemuk yang cinta damai?

5. Hipotesis

- a. Penulis akan melihat lebih mendalam tentang esensi identitas agama, khususnya, secara personal dan komunal dalam menganalisis suatu konflik atau diskriminasi berdasarkan agama. Dari identitaslah seseorang atau sekelompok orang mengidentifikasikan diri dan tindakannya dengan begitu lekat. Seseorang sering mengidentikkan identitas dirinya dengan identitas agamanya ("agama saya adalah saya"). Oleh karena itu segala bentuk "gangguan atau ancaman dari luar" terhadap keberadaan agama tertentu nampaknya dianggap sebagai

"gangguan atau ancaman" langsung kepada diri seseorang atau sekelompok orang. Seseorang atau sekelompok orang akan melakukan segala upaya untuk mencegah hal tersebut terjadi dan ditambah faktor kecenderungan *Manichaeen Mindset* yang menjelajahi keberadaan identitas komunal suatu kelompok, yang menganggap "kelompok kita (*in-group*)" adalah selalu baik, benar dan suci, sementara "kelompok mereka (*out-group*)" adalah berkebalikan.¹⁹ Dalam Manikheisme (215-176 M) diajarkan dualisme prinsip yaitu baik: zat kerajaan terang, buruk: zat kerajaan kegelapan. Semua hal yang material/duniawi adalah buruk. Nabi *Manii* (Persia) mengklaim diri sebagai Sang Terang: inkarnasi Kristus, Zoroaster dan Budha. Penulis menganalisis dinamika identitas keagamaan dalam kaitannya dengan kecenderungan tindakan diskriminatif.

- b. Kontestasi agama di ruang publik masih sering dipahami sebagai bentuk penguasaan atau kolonisasi sehingga menimbulkan ancaman terhadap eksistensi agama lain yang ujungnya berdampak pada konflik tersembunyi.²⁰ Maka ada pengrusakan rumah ibadah, penolakan izin pendirian, pengrusakan tempat ziarah.

6. Metode Penelitian

Metode yang dilakukan ialah penelitian lapangan (*field research*) yang sifatnya kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, akibat, faktor penyebab, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran seseorang secara individual atau kelompok. Wawancara dilakukan dengan tokoh-tokoh agama Islam dari golongan Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah baik yang menolak maupun yang mendukung pendirian gereja. Penelitian dilakukan di Jl. Jend. Soedirman No. 179 RT.49 RW.05 desa Randudongkal, Kecamatan Randudongkal, Pemalang. Konflik terjadi sejak 4 November 2011 dan sampai saat ini belum menemukan titik terang untuk penyelesaian konflik tersebut. Tesis ini bertujuan menemukan titik terang permasalahan dan mengusulkan solusi konflik. Dengan *live in* di tempat penelitian selama beberapa hari penulis bersentuhan langsung dengan objek dan mengumpulkan informasi lebih lengkap.

¹⁹ Agustinus, *Pengakuan-Pengakuan (Confessiones)*, terj: Ny. Winarsih Arifin dan Th. Van den End, (Yogyakarta: Kanisius 1997) h.123.

²⁰ Gusti A.B. Menoh, *Agama dalam Ruang Publik*, (Yogyakarta: Kanisius 2015) h.189 dan 199.

7. Prosedur Pengumpulan Data

Data primer yang digunakan akan diambil oleh penulis secara langsung dari lokasi penelitian di Kecamatan Randudongkal dan kantor Kemenag Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Data akan berbentuk transkrip wawancara dengan para narasumber terkait dan catatan-catatan yang mendukung penelitian ini. Data sekunder yang digunakan akan diambil melalui studi kepustakaan atau studi dokumen-dokumen yang berupa surat-surat, lembar kusioner para responden. Dengan menggunakan studi kepustakaan diharapkan penelitian ini menjadi lebih terarah dan sistematis.

Dalam penelitian data yang akan dikumpulkan berupa angka-angka, keterangan tertulis, informasi lisan, dan beragam fakta yang berhubungan dengan judul tesis. Dalam tesis ini digunakan tiga teknik utama pengumpulan data, yaitu:

- a. Studi dokumen-dokumen: dimaksudkan sebagai cara mengumpulkan data dengan mempelajari dan mencatat bagian-bagian yang dianggap penting dari berbagai risalah resmi yang terdapat baik di lokasi penelitian maupun di instansi lain yang ada hubungannya dengan lokasi penelitian.
- b. Wawancara: Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara yang terfokus pada suatu masalah penolakan izin pendirian Gereja Randudongkal dan wawancara bebas yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berpindah-pindah dari satu pokok ke pokok lain, sepanjang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta menjelaskan aspek-aspeknya. Penggunaan teknik wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi dari pihak-pihak yang menolak maupun mendukung pendirian gereja. Subjek yang diwawancarai terdiri dari beberapa subjek yang dianggap dapat melengkapi keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis mengalami kesulitan untuk mewawancarai responden perempuan karena terbatasnya informasi mereka sehingga menolak diwawancarai. Selain itu keterlibatan para tokoh kyai (laki-laki) dalam kasus Randudongkal lebih dominan. Berdasarkan beberapa pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan maka dapat disajikan kisi instrumen sebagai panduan awal untuk menyusun instrumen, baik pedoman studi dokumentasi maupun pedoman wawancara.

- c. Studi literatur: Studi literatur dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Penulis akan melakukan studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan dan mengolah data yang sudah terdokumentasikan.

8. Prosedur Proses Data

Data akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan cara :

- a. Proses mengumpulkan data. Data yang diperoleh dari hasil penelitian baik dari wawancara, studi pustaka maupun dokumen akan diklasifikasikan ke dalam tingkat kepentingannya, dirangkum dan dipilah-pilah ke dalam hal yang substansial. Masing-masing data akan di-*cross check* ke data yang lain, dengan mengklarifikasi kepada narasumber sehingga akan diperoleh keakuratan data.
- b. Penyajian Data, yaitu data yang sudah dikumpulkan, dipilah dan dikelompokkan akan disajikan dalam bentuk gambar maupun tabel sehingga mudah dipahami.
- c. Kesimpulan dan verifikasi; penulis akan membuat kesimpulan-kesimpulan berdasarkan data dan informasi yang diperoleh yang sudah diolah dan disajikan dalam tahapan sebelumnya. Sesuai dengan mekanisme logika pemikiran induktif, maka penarikan kesimpulan akan dimulai dari hal-hal yang khusus sampai pada kesimpulan yang bersifat lebih umum.

9. Metode atau Alat Analisis

Metode atau alat analisis yang dipakai adalah penggunaan statistik. Data statistik memberi informasi tentang kependudukan, klasifikasi umur, tingkat pendidikan dan agama, mata pencaharian, status ekonomi, kuantitas dan kualitas pengajar agama di sekolah serta fasilitas keagamaan yang didapat dari responden dan informasi penduduk setempat. Hal ini akan dipergunakan untuk menganalisis pemahaman keagamaan dan paradigma masyarakat terhadap keragaman. Data diperoleh dari instansi pemerintahan Kecamatan Randudongkal dan Kantor Kementerian Agama kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.

10. Sistematika Penulisan

Tesis ini dijabarkan dalam enam bab secara sistematis. Masing-masing bab mempunyai keterkaitan dan berakhir pada usulan konkret pembangunan komunitas berwawasan damai. Bab I

merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, landasan teori, perumusan masalah, hipotesis, metode penelitian, kerangka pembahasan, prosedur pengumpulan dan proses data, serta metode analisis yang digunakan. Bab II adalah penjelasan kasus penolakan izin pendirian gereja Katolik di Randudongkal. Bab ini membahas situasi umat stasi Santo Yosep Randudongkal dalam kasus penolakan perizinan gereja. Pemaparan kasus didukung oleh kesaksian dan wawancara dengan pihak-pihak yang berada di wilayah konflik. Data statistik dan demografi sangat mendukung penulis dalam mencermati objek penelitian hingga pada pemahaman tentang konflik yang terjadi di lapangan.

Bab III merupakan uraian analisis praktik kekerasan bernuansa identitas agama dalam proses pendirian Gereja St. Yosep Randudongkal. Gagasan Johan Galtung tentang kekerasan dan perdamaian digunakan untuk menyoroti persoalan kekerasan struktural dan kultural yang terjadi di Randudongkal. Konsep kekerasan bukan hanya dalam bentuk fisik dan psikologis, namun bersifat tidak langsung dan terstruktur. Meski demikian kekerasan tidak langsung pun akan berdampak pada kondisi psikologis pihak korban konflik. Menurut Galtung, kekerasan terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya. Galtung menyatakan bahwa level potensial adalah pengetahuan dan sumber daya. Apabila pengetahuan dan sumber daya dimonopoli oleh kelompok atau digunakan untuk tujuan lainnya, maka tingkat yang aktual akan turun di bawah yang potensial, dan kekerasan hadir dalam sebuah sistem. Kekerasan struktural akan menimbulkan kekerasan lain dalam berbagai bentuk, seperti diskriminasi, segregasi sosial, trauma kolektif dan politik identitas.

Dalam bab IV penulis membahas tentang praktik hubungan lintas agama di Randudongkal yang disoroti dengan pandangan Paul Ricoeur tentang pentingnya narasi hidup atau perjumpaan yang mengubah paradigma. Selama ini dialog transformatif belum terbentuk sehingga hubungan antar agama masih sebatas toleransi yang pasif, “asal tidak saling mengganggu”. Pemikiran kritis Paul Ricoeur dipilih penulis untuk memberi solusi perdamaian atas praktik kekerasan. Konflik terjadi karena interpretasi yang dimiliki seseorang atau kelompok berpengaruh pada tindakannya. Maka perjumpaan yang dialogis dan humanis perlu dibuat agar paradigma masyarakat berubah oleh masyarakat Randudongkal. Bab V merupakan usulan strategis dalam membangun perdamaian dan penulis menawarkan solusi konflik bernuansa identitas agama. Konflik tidak

dihentikan melalui sebuah resolusi dari pihak ketiga sehingga terjadi proses arbitrase, namun diupayakan gerak dekonstruksi, rekonstruksi dan rekonsiliasi pada pihak-pihak yang berkonflik, melalui program perdamaian yang berkelanjutan.

Akhirnya, bab VI adalah kesimpulan, evaluasi, saran dan rekomendasi, khususnya kepada pihak Paroki Santo Lukas Pemalang dan Keuskupan Purwokerto tentang reksa pastoral hubungan antar agama sebagai perwujudan iman dan visi Gereja. Jika ingin relevan eksistensinya, Gereja harus hadir dan berperan dalam kisah perjumpaan lintas agama yang transformatif dan humanis, berani mengubah perilaku “triumphalistik” yang menampilkan kejayaan, kemenangan, kekayaan dan kemegahan dengan memberi bantuan untuk tujuan keamanan, namun justru menciptakan jarak dalam masyarakat.

BAB VI

PENUTUP

1. Kesimpulan

Pada pendahuluan tesis ini penulis mengajukan pertanyaan mengenai penyebab terjadinya konflik dan penolakan dalam proses perizinan gereja di Randudongkal. Jawaban ditemukan dalam analisis berdasarkan dua teori yakni teori perdamaian Johan Galtung dan teori hermeneutika Paul Ricoeur. Dalam hipotesis *pertama*; penulis menyampaikan keinginannya untuk melihat lebih mendalam tentang esensi identitas, khususnya, identitas personal dan komunal (dalam hal ini identitas agama) dalam menganalisis suatu konflik atau diskriminasi berdasarkan agama. Dari identitaslah seseorang atau sekelompok orang mengidentifikasi diri dan tindakannya dengan begitu lekat. Seseorang sering mengidentikkan identitas dirinya dengan identitas agamanya ("agama saya adalah saya"). Oleh karena itu segala bentuk "gangguan atau ancaman dari luar" terhadap keberadaan agama tertentu nampaknya dianggap sebagai "gangguan atau ancaman" langsung kepada diri seseorang atau sekelompok orang. Seseorang atau sekelompok orang akan melakukan segala upaya untuk mencegah hal tersebut terjadi dan ditambah faktor kecenderungan *Manichaean Mindset* yang menganggap "kelompok kita (*in-group*)" adalah selalu baik, benar dan suci, sementara "kelompok mereka (*out-group*)" adalah berkebalikan. Oleh karena itulah, penulis menganalisis dinamika identitas keagamaan dalam kaitannya dengan kecenderungan tindakan diskriminatif. *Kedua*; penulis mau melihat bahwa kontestasi agama di ruang publik masih sering dipahami sebagai bentuk penguasaan atau kolonisasi sehingga menimbulkan ancaman terhadap eksistensi agama lain yang ujungnya berdampak pada konflik tersembunyi. Maka ada penolakan izin pendirian gereja.

Setelah melakukan penelitian di Randudongkal dan disoroti dengan dua teori tersebut terjawab pertanyaan dalam tesis ini. Kekerasan telah terjadi dalam proses permohonan izin pendirian gereja Randudongkal. Dalam pemikiran Johan Galtung kekerasan terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa, sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya. kekerasan dalam kasus di Randudongkal bernuansa agama. Hal ini terjadi karena agama adalah lembaga dan memiliki struktur. Selain itu agama juga bagian dari kultur. Oleh karena pengaruh struktur dalam Organisasi Masyarakat dan beberapa tokoh agama

Randudongkal maka gereja tidak dapat didirikan. Keadaan itu menyebabkan tingkat aktualisasi umat Katolik di Randudongkal berada di bawah potensialnya. Galtung melihat jenis kekerasan ini adalah kekerasan tidak langsung atau kekerasan struktural. Kekerasan struktural dapat menghalangi untuk memenuhi kebutuhan dasar, yakni kelestarian atau keberlangsungan hidup, kesejahteraan, kebebasan, dan identitas. Dalam perspektif teori kekerasan Galtung, kekerasan yang dilakukan dalam agama menjadi kekerasan kultural. Praktik kekerasan kultural di Randudongkal terjadi dari lingkup kaum fundamentalis Islam lalu ke masyarakat umum. Dukungan terhadap pendirian rumah ibadah agama lain dianggap sebagai tindakan pemurtadan dengan mencampuri urusan ibadah agama orang kafir.

Johan Galtung menyebut salah satu kebutuhan dasar manusia ialah identitas, selain ada kesejahteraan dan kebebasan. Kekerasan akan menghalangi pemenuhan kebutuhan akan identitas dan kebebasan mengaktualisasikan diri. Dalam kasus di Randudongkal secara terselubung kaum mayoritas mengaktualisasikan identitasnya salah satunya pendirian masjid Syiah di sebelah selatan Randudongkal.¹³³ Walau pengikut Syiah sangat sedikit dan pemrakarsa bangunan masjid ada di Surabaya, namun pembangunan Masjid berjalan tanpa ada penolakan. Ketidaklancaran pembangunan lebih disebabkan oleh kurangnya dana. Bangunan tersebut terletak di persawahan, pinggir jalan utama masuk Randudongkal, namun tanpa rumah penduduk di sekitarnya. Kondisinya lengang walau jalan di depannya dilewati kendaraan umum dari luar kota. Sementara ketika gereja Katolik atau GPPS mau mendirikan rumah ibadah diusulkan agar jauh dari pusat kota. GPPS awalnya mendirikan di tengah kebun kelapa, namun ketika daerah itu menjadi kampung, kegiatan ibadah dirasa mengganggu warga sekitar. Di balik kisah ini penulis menangkap adanya kebutuhan akan identitas dan perlu eksis di ruang publik. Kontestasi agama di ruang publik masih sering dipahami sebagai bentuk penguasaan atau kolonisasi sehingga menimbulkan acaman terhadap eksistensi agama lain yang ujungnya berdampak pada konflik terselubung.

Berbicara tentang identitas dalam masyarakat, juga tidak akan terlepas dari konteks mayoritas dan minoritas. Artinya selalu muncul istilah penduduk yang secara kuantitas memiliki jumlah lebih banyak dan memiliki pengaruh lebih besar yang pada akhirnya mendominasi baik struktur maupun tatanan sosial dalam masyarakat. Penguasaan ruang publik dapat menimbulkan

¹³³ Lampiran 11: Foto masjid Syiah .

gesekan terhadap hubungan sosial dan kerukunan antarumat beragama dalam masyarakat. Kontestasi dalam praktiknya seringkali menimbulkan ketidaknyamanan, menjadi ancaman, dan menimbulkan konflik secara tersembunyi. Ruang publik menjadi arena kontestasi berbagai pihak dengan kepentingannya masing-masing. Identitas merupakan sesuatu yang dikonstruksikan, misalnya bangunan gereja dengan simbol salib di depan, lantunan nyanyian saat ibadah, aktivitas gereja yang mengundang sejumlah jemaat dari Pemalang, pembagian sembako di hari raya dan sebagainya. Maka ada pelemparan batu ke rumah ibadah saat berlangsung ibadah jemaat GPPS, penolakan izin pendirian gereja Katolik, larangan merenovasi bangunan rumah yang sekarang masih dipakai ibadah dan larangan pasang atribut/papan nama gereja di depan bangunan untuk ibadah.

Menurut Paul Ricoeur, persoalannya ialah konstruksi pikiran dan simbol-simbol yang dimiliki manusia beragama membuat sekat pembedaan antara yang baik-buruk, selamat-binasa, beriman-kafir, benar-sesat, masuk surga-masuk neraka, anak Tuhan-pengikut iblis. Hal ini dalam praktik pergaulan antar manusia sangat memungkinkan gesekan, ketersinggungan dan perselisihan. Akar kekerasan dalam kasus penolakan izin pendirian gereja di Randudongkal adalah suatu konstruksi yang menyudutkan agama lain dan kepentingannya. Penyebab kekerasan ialah interpretasi terhadap teks-teks berikut ini: (1). Paradigma Islam terhadap Kristen (2). Nuansa “api” dalam terminologi “kafir” dan “murtad” (3). Simbol-simbol agama lain sebagai ancaman (4). Sikap tertutup terhadap agama lain (5). Narasi-narasi yang tidak membangun perdamaian (6). Sindrom minoritas dan fobia kristenisasi.

Saat ini permasalahan masih menggantung. Sementara pendekatan yang diusulkan para ahli ada yang cocok ada yang tidak. Pendekatan struktural menurut penulis belum bisa dilaksanakan. Tentu suatu saat ada peluang untuk dipakai pendekatan struktural, namun saat ini pendekatan yang diperlukan menurut penulis ialah pendekatan humanis kultural. Contohnya para pemegang *stakeholder* belum siap. Ada faktor-faktor eksternal mereka yang masih dipertimbangkan, misalnya faktor ekonomi, tingkat pendidikan masyarakat.

Pendekatan ini tentunya hanya bisa diterapkan pada masyarakat yang memiliki demografi hampir sama dengan Randudongkal, baik itu latar belakang pendidikannya, pola pikirnya maupun kondisi ekonominya. Penulis meyakini akan sebuah usulan strategis untuk membangun masyarakat damai di Randudongkal, yakni komunitas lintas agama yang berwawasan damai,

partisipatif dan transformatif. Komunitas ini sesuai dengan kekhasan Indonesia sebagai orang “timur” yang memiliki budaya *kumpul* sebagai perjumpaan yang diwarnai persaudaraan, silaturahmi dan terjadi rekonsiliasi.

Dalam perjumpaan itulah dimungkinkan terjadinya proses dekonstruksi, rekonstruksi dan rekonsiliasi. Kegiatan pelatihan Islam yang damai dan Komunitas Pesantren berbisnis merupakan kegiatan yang memperkuat paham Islam yang *damai rahmatan lil alamin*. Gerak rekonstruksi terjadi pada kegiatan gelar budaya lintas agama, pawai kebangsaan dan diakonia transformatif. Kemudian kegiatan komunitas “pondok damai” merupakan wahana kaum muda lintas agama untuk mengupayakan rekonsiliasi. Dengan pendekatan kultural penulis meyakini perdamaian yang berkeadilan akan terwujud di Randudongkal.

2. Saran dan Kritik

Penulis juga perlu menyampaikan evaluasi, khususnya kepada pihak Paroki Santo Lukas Pemalang dan Keuskupan Purwokerto tentang reksa pastoral hubungan antar agama sebagai perwujudan iman dan visi Gereja. Jika Gereja ingin relevan eksistensinya, harus hadir dan berperan dalam kisah perjumpaan lintas agama yang transformatif dan humanis, berani membongkar kesan “*triumphalistik*” yang menampilkan kejayaan, kemenangan, kekayaan dan kemegahan dengan memberi bantuan untuk tujuan keamanan, namun justru menciptakan jarak dalam masyarakat. Tesis ini berangkat dari hasil penelitian dan refleksi penulis atas pengalaman 16 tahun sebagai seorang imam diosesan di tengah pergumulan pastoralnya.

Penulis juga menyadari bahwa penelitian dan analisis dalam tesis ini bukanlah satu-satunya alat untuk menyelesaikan kasus kekerasan bernuansa identitas agama. Sangat terbuka kemungkinan untuk menganalisis kasus yang sama dengan menggunakan disiplin ilmu yang lain seperti ekonomi, komunikasi, psikologi sosial dan lainnya untuk menuntaskan konflik kekerasan bernuansa identitas agama.

3. Rekomendasi

Hasil akhir penelitian tentang kasus penolakan izin pendirian gereja di Randudongkal membuahkan beberapa rekomendasi sebagai berikut.

a. Rekomendasi untuk FKUB Pemalang:

Berdasarkan penelitian atas kasus kekerasan bernuansa identitas agama ini, penulis mendesak peran FKUB agar benar-benar menjaga kerukunan antar agama di kabupaten Pemalang, khususnya di Randudongkal. Program-program FKUB harus menjadi nyata, didukung oleh perwakilan semua agama dan didanai pemerintah sebagai institusi resmi pembentuk FKUB dengan Bupati sebagai penanggungjawab. FKUB kembali pada asas dan dasarnya untuk menjaga kerukunan dan mengayomi kepentingan semua agama bukan hanya agama mayoritas saja. FKUB dalam pengambilan keputusan menghindari sistem *voting* dan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan berasaskan keadilan. FKUB bukan forum formalitas, maka harus punya program kerja yang nyata dan dijalankan secara serius demi kerukunan umat beragama. Juga bukan semacam pemadam kebakaran, yang hanya bekerja saat terjadi musibah. Kegiatan *monitoring* perlu dilakukan secara rutin. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya konflik bernuansa sara, mengetahui sudah berapakah rumah ibadah yang belum mendapatkan izin, kesulitannya apa dan sebagainya

b. Rekomendasi untuk Pemerintah Kabupaten Pemalang:

Pemerintah berani menindak tegas tindakan intoleransi yang meresahkan warga masyarakat dan berperan sebagai *pengayom* seluruh warga masyarakat. Pemerintah khususnya Kabupaten Pemalang perlu giat dalam berperan sebagai mediator, negosiator dan fasilitator pertemuan lintas agama sehingga tercipta keharmonisan hubungan lintas agama di Pemalang. Komunikasi pemerintah dengan para tokoh agama perlu ditingkatkan melalui silaturahmi dan pertemuan-pertemuan pribadi baik dalam forum formal maupun informal.

c. Rekomendasi untuk Pastor Paroki Santo Lukas Pemalang:

Seturut Visi Gereja paroki Pemalang yakni “Gereja yang hidup dan Memasyarakat”, kiprah hubungan harmonis dengan agama-agama lain menjadi fokus pastoral. Gereja harus berani keluar dan tidak sibuk sendiri dengan pelayanan internal. Pastor paroki bersama Dewan Pastoral Paroki berada pada ujung tombak hubungan lintas agama di Pemalang.

d. Rekomendasi untuk Kepala Kemenag Pemalang:

Kepala Kemenag memegang kendali untuk mewujudkan kerjasama lintas agama. Dalam hubungan baik dengan para tokoh agama, kepala Kemenag bertanggung jawab dan hadir dalam komunitas agama apapun, sebab tugasnya melindungi dan melayani semua umat dari semua agama.

e. Rekomendasi untuk Pengurus Stasi Santo Yosep Randudongkal:

Segenap pengurus dan seluruh warga Stasi Santo Yosep harus belajar dari kisah konflik penolakan izin pendirian gereja, siap melakukan rekonsiliasi lintas agama dan berani bersatu sebagai umat Katolik serta lebih dahulu menciptakan iklim rekonsiliatif internal dan membangun silaturahmi dengan umat Islam di Randudongkal.

FDAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Abidin Bagir, Zainal, *Pluralisme Kewargaan*, Yogyakarta: CRCS-UGM, 2016.
- Agustinus, *Pengakuan-Pengakuan (Confessiones)*, terj: Ny. Winarsih Arifin dan Th. Van den End, Yogyakarta: Kanisius, 1997.
- Alfitri, *Community Development, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Ali Engineer, Asghar, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Cobb, John B., *Transforming Christianity and the World, A beyond Absolutism and Relativism*. Edited and Introduced by Paul F. Knitter. Published by New York, USA: Orbis Book, Maryknoll, 1999.
- Christianto, Simon John, *Hermeneutik Paul Ricoeur dan Tugas Emansipasi*, Yogyakarta: Disertasi FT-UKDW, 2016)
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2008 Edisi Keempat.
- Dewey, John , *Experience and Education*, (New York: Macmillan Publishing Company, 1963) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1997).
- Effendi, Djohan, *Pluralisme dan Kebebasan Beragama*, Yogyakarta: Interfidei, 2010.
- Mujib, Ibnu M.A, *Paradigma Transformatif Masyarakat Dialog*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Galtung, Johan, *Peace, Peacefull Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*, London: IMPRIO, SAGE Publication, 1996.
- _____, *Studi Perdamaian*, Surabaya: Eureka, 2003.
- Geertz, Clifford , *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2013.
- Hardiman, F. Budi, *Seni Memahami*, Yogyakarta: Kanisius, 2018.
- Hery, Musnur, *Hermeneutika Relijius Paul Ricoeur dan Fazlur Rahman*, dlm Desertasi yang diajukan program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.

- Hidayati, Tri Wahyu, *Apakah Kebebasan Beragama, Bebas Pindah Agama? Perspektif Hukum Islam dan HAM*, Surabaya: STAIN Salatiga Bekerja sama dengan JPBOOKS, 2008.
- Ja'far Subhani, Syaikh, *Tauhid dan Syirik*, Studi khusus faham Wahabi, Bandung: Mizan, 1987.
- Kearney, Richard, dkk., *The Continental Philosophy Reader*, London: Routledge. 1996.
- Lederach, John Paul, *Transformasi Konflik*, terj: Daniel K. Listijabudi, Yogyakarta: Pusat Studi dan Pengembangan Perdamaian Universitas Duta Wacana, 2005.
- Menoh, Gusti A.B., *Agama dalam Ruang Publik*, Yogyakarta: Kanisius, 2015.
- Prent C.M, dkk, *Kamus Latin – Indonesia*, Semarang: Penerbitan Jajasan Kanisius, 1969.
- Ricoeur, Paul, *Hermeneutika Ilmu Sosial*, diterjemahkan oleh Muhammad Syukri, cet. Ke-2, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008.
- _____, *Teori Interpretasi: Memahami Teks, Penafsiran dan Metodologinya*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2012.
- _____, *Hermeneutics and Human Sciences*. New York: Cambridge University Press. 1995.
- _____, *Freud and Philosophy*, New Haven: Yale University Press, 1970.
- _____, *The Symbolism of Evil*, Boston: Beacon Press, 1967.
- Riyanto, Armada, *Relasionalitas: Filsafat fondasi Interpretasi*, Yogyakarta, Kanisius, 2018.
- _____, *Dialog Interreligius*, Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- Schumann, Olaf H., *Agama-agama Kekerasan dan Perdamaian*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015
- Simms, Karl, *Paul Ricoeur*, London: Routledge. 2003.
- Sugiharto, I Bambang, *Postmodernisme: Tantangan bagi Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1996.
- Susan, Novri, *Sosiologi Konflik Isu-Isu Konflik Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Sumaryono, E., *Hemeneutik, Sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- Viktorahadi. Bhanu, Pr., *Menjadi Gereja yang Bergelimang Lumpur*, Telaah Singkat Anjuran Apostolik Paus Fransiskus Evangelii Gaudium, Yogyakarta: Kanisius, 2015.
- Windu, I.Marsana, *Kekuasaan dan kekerasan menurut Johan Galtung*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.

Widyatmadja, Josef , *Yesus dan Wong Cilik, Praksis Diakonia Transformatif dan Teologi Rakyat di Indonesia*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010).

Tulisan /Artikel:

Banawiratma, J.B., dlm Kata Pengantar Buku *Menuju Diakonia Transformatif*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2013.

Galtung, Johan, "Why the Concern with Ways of Life", GDIP Project, United Nation University, dalam *The Western Development Model and Life Style*, Council for International Development Studies, Oslo, 1980.

Haryatmoko, "Transparansi sebagai proses hermeneutika" dlm *Tulus seperti merpati Cerdik seperti ular*, Yogyakarta: Kanisius, 2001.

_____ "Hermeneutika Paul Ricoeur" dlm *BASIS*, (Nomor 05-06, Th Ke-49, Mei-Juni 2000).

Jemadu, Alekius, "Analisis konflik Internal dari Perspektif Hubungan Internasional", dlm buku *Transformasi dalam studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu, dan Metodologi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

Mas'oed, Mochtar , *Galtung, Perspektif Kritis, dan Hubungan Internasional*, Sebuah Pengantar, dalam Marsana Windhu. *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.

Putranta S.J., C.B., *The Idea of The Church in the Documents of the Federation of Asian Bishop's Conferences 1970-1982*.

Wibowo, Wahyu S., *Efektivitas Simbol-Simbol Religius*, dalam Majalah Gema Duta Wacana, Vol.31, No.2, Oktober 2007.

Jurnal:

Galtung Johan, "A Structural Teory of Imperialism", dlm *Journal of Peace Research*, Vol. 8, No.2, 1971.

_____ "Violence, Peace and Peace Research" dlm. *Journal of Peace Research (JPR)*, Vol.6 No.3, 1969.

_____ "Violence, Peace and Peace Research" dlm. *Journal of Peace Research (JPR)* No.3. Vol.6, 1969.

Hehanusa, Josef M. N., "Pelayanan Diaconia Yang Transformatif: Tuntutan atau Tantangan", dlm *Gema Teologi: Jurnal Fakultas Teologi UKDW*, Vol.36 April 2012

Nurkhalis, "Konstruksi Teori Paradigma Thomas S Kuhn", dlm *Journal UIN Ar-Raniry* Vol. XI, No. 2, Februari 2012

Ricoeur, Paul, "Philosophy and Religious Language" dalam *Journal of Religion* 54 (1974)

Sastrapratedja, M., "Hermeneutika dan Etika Naratif Menurut Paul Ricoeur" dlm *Jurnal Kanz Philosophia*, Vol.2, No. 2, 2012.

Shiddiqi, Nourouzzaman, "Sunni dalam Perspektif Sejarah", dlm *Journal Al Jami'ah* No. 57 Th.1994.

Wachid, Abdul, "Hermeneutika Sebagai Sistem Interpretasi Paul Ricoeur" dalam Memahami Teks-teks Seni, *Jurnal Imaji*, Vol. 4, No.2 STAIN Purwokerto, Agustus 2006.

Internet:

Galtung, Johan, *Learning from Gandhi: Towards a non violent world order*. New Delhi: The Satyagraha Centenary. (online), (www.transnasional.org, diakses pada 12 Februari 2011).

_____, "Cultural Violence", dalam *Journal of Peace Research*. (online) Vol. 27, No. 3. 1990, (<http://www.jstor.org/stable/423472> diakses pada 7 Februari 2011).

_____, "A Structural Theory of Imperialisme", *Journal of Peace Research* (online) Vol 8 No 2, (<http://www.jstor.org/stable/423477> diakses pada 7 Februari 2011).

_____, "Violence, Peace, and Peace Research" dlm. *Journal of Peace Research (JPR)*, Vol. 6, No. 3, h. 167-191, (<http://www.jstor.org/stable/422690> diakses pada 7 Februari 2011).